

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tenaga Kerja

Pada bab ini, penyusunan akan menyajikan tinjauan pustaka sebagai gambaran konsep dasar mengenai teori-teori variabel untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang dilandasi dengan adanya riset terdahulu. Kemudian membahas terkait kerangka berpikir yang menjelaskan tentang model variabel terkait, lalu diikuti dengan hipotesis penelitian yang diajukan untuk diuji kebenarannya.

2.1.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*man power*) merupakan kelompok yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* terdiri dari kelompok orang yang bekerja, yang menganggur dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari orang yang bersekolah, yang mengurus rumah tangga dan lain yang menghasilkan pendapatan (Simanjuntak, 1985). Sedangkan menurut undang-undang no.13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik untuk menghasilkan barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Dari segi fisik, kemampuan kerja seringkali diukur dengan usia pekerja. Sehingga tenaga kerja merupakan bagian dari populasi yang telah mencapai usia kerja. Dikarenakan kondisi tenaga kerja yang berbeda di

masing-masing negara, maka setiap negara menetapkan adanya batasan usia untuk setiap tenaga kerjanya. Di Indonesia sendiri populasi yang sudah memasuki usia kerja adalah penduduk yang berusia dewasa minimal 15 tahun sampai 65 tahun (Gatiningsih, 2017). Menurut Sukirno (2013:18) untuk menemukan angkatan kerja atau bukan angkatan kerja diperlukan informasi yaitu:

1. Jumlah penduduk yang berusia diantaranya 15-64 tahun yang ada disebut dengan penduduk usia kerja,
2. Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang tidak bekerja (seperti mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela) penduduk tersebut merupakan penduduk bukan angkatan kerja.

Secara praktis pengertian tenaga kerja atau bukan tenaga kerja dibedakan oleh batasan umur. Tujuan dari ditentukannya batas usia ini supaya definisi yang diberikan dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.

2.1.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Wahyudi (2004) penyerapan tenaga kerja adalah kondisi dimana adanya peluang pekerjaan yang tersedia untuk dipenuhi oleh para pencari kerja atau diterimanya para pelaku kerja untuk melakukan tugas-tugas sebagaimana mestinya berdasarkan posisi yang dibutuhkan. Secara umum, penyerapan tenaga kerja dikaitkan dengan interaksi keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, dimana interaksi ini menentukan keseimbangan tingkat upah dan penggunaan tenaga kerja. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia adalah menciptakan lapangan kerja. Pembangunan ekonomi yang semakin

meningkat dan membaik akan berdampak pada meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga bisa mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja disuatu negara.

2.1.1.3 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, Menurut Santoso (2012) permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan terhadap barang yang diproduksi, sehingga perusahaan akan menambah jumlah tenaganya untuk memenuhi produksi jika permintaan akan barang produksi meningkat. Oleh karena itu permintaan tenaga kerja disebut sebagai *derived demand* atau permintaan turunan dari permintaan akan barang atau jasa. Hal tersebut dikarenakan permintaan akan barang atau jasa menjadi salah satu faktor penentu akan permintaan tenaga kerja selain faktor produktivitas, harga input-input lain dan jumlah pengusaha (Tarmizi, 2012). Ada hubungan antara permintaan tenaga kerja dan permintaan barang dan jasa. Permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu memberikan nikmat (*utility*) kepada si pembeli. Sementara perusahaan mempekerjakan seseorang karena dapat membantu proses produksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, peningkatan permintaan tenaga kerja perusahaan bergantung pada peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Permintaan akan tenaga kerja yang seperti itu disebut *derived demand* (Simanjuntak, 1998). Di dalam menganalisis mengenai permintaan perlulah disadari perbedaan di antara istilah “permintaan” dan “jumlah barang yang diminta”. Simanjuntak (1985) mendefinisikan yang dimaksud dengan permintaan adalah keseluruhan hubungan

antara berbagai tingkat upah dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah yang diminta berarti banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu.

Selanjutnya, menurut Santono (2012) ada penawaran tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat di usia kerja yang tergolong dalam angkatan kerja. Semakin banyak angkatan kerja maka penawaran tenaga kerja juga akan meningkat. Penawaran tenaga kerja adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya.

Adanya keseimbangan interaksi antara permintaan dan penawaran sangat terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Dalam suatu pekerjaan terdapat penawaran tenaga kerja yang besar tetapi tidak banyak permintaan, maka upah untuk mencapai tingkat akan sangat rendah. Sebaliknya jika dalam suatu pekerjaan yang terdapat penawaran tenaga kerja terbatas akan membuat permintaannya menjadi sangat besar, maka upah cenderung mencapai tingkat tinggi. Jumlah orang yang bekerja dipengaruhi oleh permintaan yang ada di masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor penyediaan dan permintaan tersebut. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan besarnya penempatan atau jumlah orang yang

bekerja dan tingkat upah berlaku, yang kemudian digunakan sebagai acuan atau pertimbangan baik oleh individu maupun perusahaan untuk menentukan jumlah orang yang bekerja. Permintaan dan penawaran harga input tenaga kerja ini pada suatu titik akan membentuk keseimbangan akibat pertemuan keduanya di pasar tenaga kerja (Simanjuntak,1998).

2.1.2 Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK)

2.1.2.1 Pengertian IP-TIK

Indeks pembangunan teknologi, informasi, dan komunikasi (IP-TIK) merupakan indeks yang dikembangkan oleh *International Telecommunication Union (ITU)* di tahun 2008 dengan nama *Information Communication Technology Development Index (ICT-DI)* dan dipublikasikan melalui buku “*Measuring the Information Society*”. Indeks pembangunan teknologi, informasi, dan komunikasi (IP-TIK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi, informasi, dan komunikasi di suatu wilayah dapat menjadi perbandingan antara wilayah dan waktu, mengukur kesenjangan digital dan mengukur peluang pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (Badan Pusat Statistik, 2020).

Kurniawan (2015) menyebutkan bahwa kemajuan teknologi akan membuat perekonomian semakin berkembang, yang ditunjukkan oleh kemajuan *skill* dan teknik dalam bidang teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Dalam mewujudkan kemajuan pembangunan teknologi, peran pemerintah dianggap penting dikarenakan semakin tingginya tingkat pembangunan teknologi informasi

dan komunikasi maka pembangunan teknologi pada suatu wilayah tersebut lebih optimal (Almizan, 2020). Menurut Kpodar & Andrianaivo (2011) perkembangan TIK telah meningkatkan produktivitas dan perdagangan global, memfasilitasi kegiatan bisnis, mendorong pertumbuhan industri, serta meningkatkan pendidikan dan kolaborasi penelitian. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berperan penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat dan telah masuk ke berbagai sektor industri, memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan dengan lebih baik. Selain itu, karena adanya beberapa kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan hanya dengan menggunakan internet dan alat komunikasi, teknologi, dan informasi telah mengubah kebiasaan masyarakat di seluruh dunia.

2.1.2.2 Skala Pengukuran IP-TIK

Untuk skala pengukuran indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) yaitu 0-10. Dengan melihat nilai indeks, bukan hanya melihat tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah namun juga dapat melihat kesenjangan pembangunan TIK antar wilayah. Nilai indeks pembangunan TIK dikategorikan menjadi tinggi (7,51-10), sedang (5,01-7,5), rendah (2,51-5), dan sangat rendah (0-2,5). Jika nilai indeks pembangunan TIK di suatu wilayah semakin tinggi atau mendekati angka 10, maka pembangunan TIK di wilayah tersebut semakin baik dan pesat. Sebaliknya, jika nilai pembangunan TIK di suatu wilayah semakin rendah atau mendekati angka 0, maka pembangunan TIK di wilayah tersebut amat buruk atau mengalami kemajuan yang relatif lambat.

2.1.2.3 Indikator IP-TIK

Badan pusat statistik menggunakan 11 indikator untuk menyusun nilai IP-TIK yang dibagi menjadi 3 sub-indeks yaitu sub-indeks akses dan infrastruktur, sub-indeks penggunaan, dan sub-indeks keahlian.

1. Sub-indeks akses dan infrastruktur menggambarkan kesiapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diukur dari sisi akses dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dengan lima indikator penyusun sub-indeks, sebagai berikut:
 - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
 - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
 - c. *Bandwidth* internet internasional per pengguna (bit/s)
 - d. Persentase rumah tangga yang menguasai computer
 - e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet
2. Sub-indeks penggunaan menggambarkan intensitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diukur dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan tiga indikator penyusun sub-indeks, sebagai berikut:
 - a. Persentase penduduk yang menggunakan internet
 - b. Pelanggan internet *broadband* tetap kabel per 100 penduduk
 - c. Pelanggan internet *broadband* tanpa kabel per 100 penduduk
3. Sub-indeks keahlian menggambarkan kemampuan atau keahlian yang dibutuhkan dalam teknologi informasi dan komunikasi (*ICT Skill*) dengan tiga indikator penyusun sub-indeks, sebagai berikut:

- a. Rata-rata lama sekolah.
- b. Angka partisipasi kasar sekunder (SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat).
- c. Angka partisipasi kasar tersier (pendidikan tinggi D1-S1).

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.3.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia alat untuk mengukur perbandingan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk negara di seluruh dunia. IPM berguna sebagai indikator untuk menilai kualitas pembangunan suatu negara dan mengklasifikasikannya apakah negara tersebut termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan ini juga dapat digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, 2015).

Menurut Kuncoro (2010) indeks pembangunan manusia berguna untuk membandingkan kualitas pembangunan manusia baik antar daerah maupun negara. IPM digunakan untuk mengetahui apakah penduduk suatu wilayah memiliki kesempatan untuk mengakses hasil pembangunan sebagai bagian dari haknya untuk mendapatkan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hak lainnya.

2.1.3.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut *united nations development programme* (UNDP), dalam indeks pembangunan manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan

untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, sebagai berikut.

1. Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup)

Indikator yang diukur dengan menggunakan angka harapan hidup (AHH) dari saat lahir untuk mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. angka harapan hidup (AHH) adalah perkiraan tingkat usia rata-rata yang akan dicapai oleh penduduk dalam periode waktu tertentu. Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH).

2. Indeks Pendidikan

Indikator utama untuk mengukur derajat pendidikan yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia sekaligus tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah dengan dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas.

3. Indeks Daya Beli (pengeluaran per kapita)

Indikator standar hidup layak merupakan peran penting terciptanya kesejahteraan bagi manusia. Standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli. Indikator daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup manusia, indikator ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada serta untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produksi sehingga menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa sebagai pendapatan. Semakin besar pendapatan maka semakin besar kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa untuk menopang kehidupan yang layak.

Selanjutnya, untuk perhitungan indeks pembangunan manusia (IPM) dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, pengeluaran sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Angka indeks pembangunan manusia berkisar antara 0 sampai 100. Semakin mendekati angka 100, maka mengindikasikan pembangunan manusia yang semakin baik (Adrogué & Crespo, 2010). Berdasarkan badan pusat statistik terdapat capaian indeks pembangunan manusia antar wilayah, yang dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Rendah: $IPM < 60$
2. Sedang: $60 \leq IPM < 70$
3. Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
4. Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan beberapa wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM pada suatu daerah atau negara, semakin baik pencapaian pembangunan masyarakat di wilayah tersebut.

2.1.4 Penanaman Modal Asing (PMA)

2.1.4.1 Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakui sisi perusahaan. Penanaman modal di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UU no. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang menyatakan bahwa “PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bekerja sama dengan penanaman modal dalam negeri”. Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau/ pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha dalam negeri, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Amalia (2007: 58) penanaman modal asing merupakan sesuatu fenomena positif karena kemampuannya mengisi kesenjangan tabungan dalam negeri, meningkatkan cadangan devisa, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan meningkatkan keterampilan manajerial dalam perekonomian negara penerimanya.

Penanaman modal asing dapat membantu pembangunan infrastruktur di daerah berkembang, khususnya di Indonesia. Sehingga adanya penanaman modal asing dapat meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Ada dua tipe investasi yang dapat digunakan ketika seseorang ingin berinvestasi yaitu investasi tidak langsung dan investasi langsung (Fahmi, 2015:4).

1. Investasi langsung (*direct investment*) yaitu investor yang memiliki dana dapat langsung berinvestasi secara langsung membeli aset keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara maupun cara lainnya.
2. Investasi tidak langsung (*indirect investment*) merupakan bentuk investasi di mana pihak yang memiliki dana dapat melakukan keputusan berinvestasi namun tidak memiliki keterlibatan secara langsung atau hanya membeli kepemilikan perusahaan dalam rupa obligasi atau saham.

2.1.4.2 Manfaat Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Winantyo et al., (2008:178) potensi manfaat bagi negara penerima untuk mendorong aliran masuk penanaman modal asing adalah:

1. Perusahaan asing membawa teknologi yang lebih tinggi. Tingkat pemanfaatan teknologi oleh negara penerima bergantung pada derajat *spill-over* teknologi terhadap perusahaan domestik dan perusahaan asing lainnya.
2. Investasi asing meingkatkan kompetisi dan perekonomian negara penerima kehadiran perusahaan baru di luar sektor perdagangan dapat meningkatkan

output dan menurunkan tingkat harga domestik, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Investasi asing mendorong peningkatan investasi domestik.
4. Investasi asing memberikan keuntungan dalam akses pasar ekspor.
5. Hal ini dilakukan melalui peningkata skala ekonomi perusahaan asing atau kemampuan perusahaan asing untuk mengakses pasar luar negeri.
6. Investasi asing dapat membantu menjebatani kesenjangan kebutuhan valuta asing dinegara penerima.

2.1.5 Inflasi

2.1.5.1 Pengertian Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses dimana terjadi kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi memiliki tingkat yang berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya (Sukirno, 2001:150). Boediono (2008:155) juga mendefinisikan inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus, akan tetapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada sebagian besar dari harga-harga barang lainnya. Salah satu peristiwa modern yang sangat penting dan sering dijumpai di hampir setiap negara di dunia adalah inflasi. Inflasi adalah suatu poses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, kenaikan harga dari

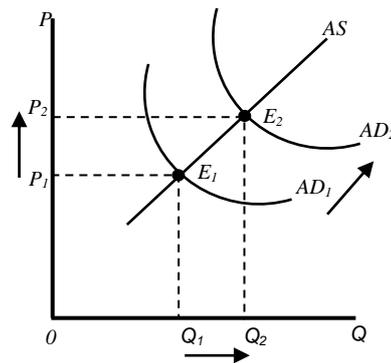
satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya (Boediono, 1998:161).

2.1.5.2 Penggolongan Inflasi

Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan (Thamrin dan Sintha 2018:41)

Inflasi digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Penggolongan pertama inflasi didasarkan atas: parah tidaknya inflasi tersebut yang terbagi atas inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi, yaitu:
 - a. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
 - b. Inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun)
 - c. Inflasi berat (antara 30% - 100% setahun)
 - d. *Hyperinflation* (di atas 100% setahun)
2. Penggolongan kedua inflasi didasarkan pada sebab musabab awal dari inflasi yang terbagi atas *demand pull inflation* dan *cost push inflation*, yaitu:
 - a. *Demand pull inflation*, yaitu inflasi yang timbul karena suatu keadaan di mana harga barang dan jasa naik karena permintaan konsumen yang lebih tinggi daripada penawaran yang tersedia.

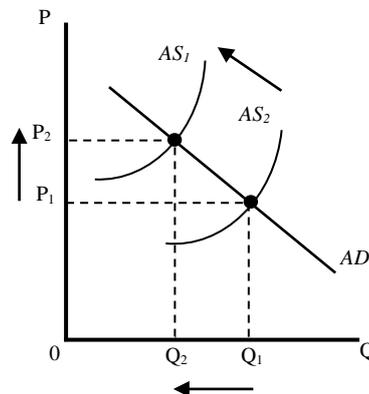


(Sumber: Verawati, 2016)

Gambar 2.1
Grafik Demand pull inflation

Grafik di atas menunjukkan hubungan antara harga barang (P), Jumlah yang diminta dan ditawarkan (Q) dan Keseimbangan harga (E). Terjadinya *demand pull inflation* Ketika permintaan akan barang dan jasa meningkat, maka kurva AD (*Aggregate demand*) bergeser dari AD_1 ke AD_2 . Ketika itu terjadi akan menimbulkan kenaikan harga barang dari P_1 ke P_2 . Sehingga terjadinya inflasi dan menimbulkan harga keseimbangan baru dari E_1 ke E_2 . Contoh terjadinya kenaikan permintaan barang dapat disebabkan adanya kenaikan gaji/upah pegawai secara nasional, kondisi menjelang lebaran dan lain sebagainya.

- b. *Cost push inflation*, yaitu biasanya ditandai dengan kenaikan harga dan menurunnya tingkat produksi. *Cost-push inflation* terjadi diawali dengan adanya penurunan dalam penawaran agregat (*agregate supply*) sebagai akibat naiknya biaya produksi.



(Sumber: Verawati, 2016)

Gambar 2.2
Grafik *Cost push inflation*

Grafik di atas menunjukkan perilaku produsen ketika menghadapi situasi dimana harga produksi mengalami peningkatan. Ketika terjadi kenaikan harga produksi maka akan menggeser kurva penawaran dari AS_1 ke AS_2 yang mengakibatkan kenaikan harga dari P_1 ke P_2 . Namun hal itu justru akan menurunkan jumlah barang/jasa yang dihasilkan dari Q_1 ke Q_2 . Hal ini dilakukan agar produsen tidak terus merugi sambil menunggu harga produksi kembali turun.

3. Penggolongan ketiga inflasi didasarkan pada asas dari inflasi yang diadakan dengan *domestic inflation* dan *imported inflation*, yaitu:
 - a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) yaitu inflasi yang timbul karena meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total

sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment*.

- b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*), yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang negara kita. Inflasi desakan biaya dapat terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (*input*) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (*output*) yang dihasilkan ikut naik.

2.1.6 Elastisitas

Menurut Gujarati (2007) dalam (Arifin, 2020) teori elastisitas konstan cocok digunakan dalam permodelan dengan data penelitian ini. Teori elastisitas konstan merupakan teori yang model regresi liniernya berbentuk logaritma. Model logaritma akan mempermudah dalam menentukan besaran elastisitas, karena koefisien variabel bebas dalam model logaritma merupakan angka elastisitas. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Angka elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel dependen akan berubah, sebagai reaksi karena satu variabel lain (variabel independen) berubah satu persen.

2.1.6.1 Kriteria Elastisitas

Berdasarkan besar kecilnya nilai koefisien elastisitas, maka elastisitas dapat dibedakan menjadi lima sebagai berikut:

1. Elastisitas Sempurna ($E = \infty$) yaitu suatu keadaan ketika berapapun jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu.
2. Inelastis sempurna ($E = 0$) yaitu suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan tidak akan mengalami perubahan sekalipun terjadi perubahan tingkat harga.
3. Elastisitas Uniter ($E = 1$) yaitu suatu keadaan dimana tingkat perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan sama dengan tingkat perubahan harga.
4. Inelastis ($E < 1$) yaitu suatu keadaan ketika tingkat perubahan jumlah yang diminta atau yang ditawarkan lebih kecil dari pada tingkat perubahan harga.
5. Elastis ($E > 1$) yaitu suatu keadaan ketika tingkat perubahan jumlah yang diminta atau yang ditawarkan lebih besar dari pada tingkat perubahan harga.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis, serta bertujuan untuk mendukung dan memperkuat terhadap penelitian yang akan dilaksanakan ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Marselino Yuda Pratama	Penyerapan tenaga	Upah Minimum	Investasi dan Indeks pembangunan	Jurnal Ilmu Ekonomi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dewi Rahmi, Ima Amaliah, 2022, Pengaruh Investasi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2020	kerja, Investasi, dan Indeks pembangunan-nan (IPM)		nan manusia (IPM) berpengaruh positif signifikan sedangkan Upah minimum provinsi (ump) berpengaruh negatif terhadap Penyerapan tenaga kerja di jawa	<i>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol.2 no. 1 (2022): bandung conferen conferenc conferenc e series: economic studies,</i>
2	Emil Abdhal Hafiz, Ria Haryatiningsih, 2021, Pengaruh PDRB, UMK, IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten /Kota Jawa Barat 2010-2020	Penyerapan Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan manusia (IPM)	Upah Minimum Kabupaten /Kota, IP-TIK, Penanaman Modal Asing dan Inflasi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten /Kota dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, Volume 1, No 1, Juli, 2021 https://doi.org/10.2933/jrieb.v1i1.174
3	Ilham Akbar Pratama, Ali Anis, 2022, Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia	Penyerapan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing,	Pendidikan, Penanaman Modal Dalam Negeri, IP-TIK, IPM dan Inflasi	Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 4, nomor 3, September 2022, hal 37-42
4	Dyah Indri Widyapangestia, Aris Soelistyo, 2022, Analisis	Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi	PDRB, Upah Minimum, IP-TIK, IPM dan Inflasi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 6, No. 1,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh PDRB, Investasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa			PMDN, dan Investasi PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Upah sedangkan, Minimum Provinsi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	Februari 2022, pp. 123-133
5	Rahmadani Putri, Idris, 2020, Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Penyerapan Tenaga Kerja, IP-TIK	Penanaman Modal Asing, IPM dan Inflasi	Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan pengaruh signifikan terhadap Pasar Tenagakerja di Indonesia	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Vol 2, No4, http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v2i4.13386
6	Gugun Gunawan, Riska Dwi Astuti, 2023, Penanaman Modal Asing Dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat	Penyerapan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing	Pendidikan, PDRB, IP-TIK, IPM dan Inflasi	Domestik Regional Bruto, dan Pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja Sedangkan Penanaman Modal Asing tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 2 Issue 2, 2023: 188-193

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Almizan, 2020, Pengaruh Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Tik Di Indonesia	Penyerapan Tenaga Kerja, IP-TIK	Pertumbuhan, IPM, PMA dan Inflasi	Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor TIK, Sedangkan, penyerapan tenaga kerja sektor TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan p-ISSN: 2528-5629 e-ISSN: 2528-5637 Vol 5, No 2
8	Dara Sukma Anjani, Sudati Nur Sarfiah, dan Fitrah Sari Islami, 2021, Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Nilai Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 1988-2020	Penyerapan Tenaga Kerja, Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Ekspor. IP-TIK, IPM dan Penanaman Modal Asing	Tingkat Inflasi, Per-tumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan Nilai Ekspor berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 1988-2020 dan variabel tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan nilai ekspor secara bersama sama berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 1988-2020.	<i>Dinamic: Directory Journal Of Economic</i> , Vol 3, No 4, https://journ.untidar.ac.id/index.php/dinamic/issue/view/123

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Siti Komariyah, Halimatus Putriya, dan R, Alamsyah Sutanto, 2019, Dampak Investasi, Kinerja Ekspor, Dan Inflasi Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia: Analisis Data Panel	Penyerapan Tenaga Kerja, Inflasi, Investasi	Kinerja Ekspor, IP-TIK, dan IPM	FDI dan kinerja ekspor memberikan dampak positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara inflasi memberikan dampak negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia.	Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.3, No. 4, e-ISSN 2548-5024p-ISSN 2548-298X
10	Arief Rachman, Khusnul bd. Azis Muthalib Rosnawintang, LM Harafah, 2022, Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektorial Di Provinsi Sulawesi Tenggara	Penyerapan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing	Penanaman Modal Dalam Negeri, IP-TIK, IPM, dan Inflasi	Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Sulawesi Tenggara	<i>Contemporary Studies In Economi, Finance And Banking</i> Vol 1 No 3, Tahun 2022
11	Fradya Randa, Lastri Anggi Fani, 2023, Pengaruh Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja serta Implikasi Pertumbuhan Ekonomi	Penyerapan Tenaga Kerja, IPM	Pertumbuhan Ekonomi, IP-TIK, PMA dan Inflasi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja serta infrastruktur transportasi jalan memberikan dampak	Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, Vol 5, No 4, Hal: 1405-1408, e-Issn: 2714-8491

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				negative pada pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.	
12	Bagas Prayoga, 2023, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kota Medan	Penyerapan Tenaga Kerja, IPM	Pertumbuhan, IP-TIK, PMA dan Inflasi	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan.	<i>Journal Economic And Strategy (JES)</i> , Vol 4, No.1, [Januari-Juni 2023 pp. 42-51
13	Nur Athirah, Chairul Sa'roni, 2023, Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Tingkat Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Kota Banjarmasin	Penyerapan Tenaga Kerja, Inflasi	Upah Minimum, PDRB, IP-TIK, IPM dan PMA	Inflasi mempunyai positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, PDRB dan tingkat upah mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 6 No. 2, 2023, hal 654-662, ISSN 2746-3249
14	Azzalina Alsavira, 2021, Implikasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Pertumbuhan	Penyerapan Tenaga Kerja, PMA	PMDN, IP-TIK, IPM, dan Inflasi	Investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dalam penyerapan tenaga kerja	Jurnal Magisma Vol. IX No. 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ekonomi Kota Surabaya			Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	
15	Lawati, 2020, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Belanja Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Barat	Penyerapan Tenaga Kerja, IPM	Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, IP-TIK, PMA dan Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten /Kota di Kalimantan Barat.	Jurnal Pembangunan dan Pemerataan (JPP)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2019:95). Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang akan menjelaskan secara teoritis hubungan atau keterkaitan antar variabel yang akan diteliti dalam teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka.

2.2.1 Hubungan IP-TIK dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Secara umum, hubungan antara indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan penyerapan tenaga kerja bersifat kompleks. Di satu sisi, penerapan TIK bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang dapat memicu permintaan akan tenaga kerja yang terampil dalam bidang TIK. Namun, di sisi lain, penerapan teknologi baru juga dapat mengubah struktur pekerjaan dan menurunkan permintaan untuk beberapa jenis pekerjaan tradisional. Dengan demikian, hubungan antara TIK dan penyerapan tenaga kerja dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks regional, sektor industri, dan tingkat keterampilan tenaga kerja yang tersedia.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Almizan (2020), Putri dan Idris (2020), Davani dan Sulistyaningrum (2022), Hidayat dan Ash shidiqie (2023) dan Fulgenzi et al., (2022) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan teknologi informasi komunikasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja TIK.

2.2.2 Hubungan IPM dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan fokus pada produktivitas tenaga kerja yang baik, sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja. Ini disebabkan karena keterampilan dan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan dalam dunia kerja. Untuk dapat mendapatkannya dibutuhkan aspek-aspek yang mendasarinya seperti kesehatan

yang memadai, pendidikan yang baik, serta daya beli konsumsi masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat sesuai pengeluaran perkapita. Dengan adanya investasi pada setiap aspek tersebut, tentunya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Banyak perusahaan yang berharap memiliki tenaga kerja yang berkualitas karena hal tersebut dapat memacu pertumbuhan perusahaan, yang kemudian dapat menghasilkan peluang baru dalam bentuk cabang perusahaan baru yang pastinya membutuhkan tenaga kerja tambahan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Abdhal dan Haryatiningsih (2021), Randa dan Fani (2023), Prayoga (2023), Ilawati (2022) dan Heryanto et al., (2023) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia akan meningkat juga penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah.

2.2.3 Hubungan PMA dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Investasi atau penanaman modal asing memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Semakin banyak perusahaan yang didirikan dengan modal asing, semakin besar kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja untuk menjalankan operasionalnya, ini berpotensi pada perluasan atau menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dengan demikian, besarnya nilai investasi akan menentukan seberapa banyak tenaga kerja yang terserap. Secara teoritis, semakin besar nilai investasi, semakin tinggi pula kesempatan kerja yang tercipta (Sukirno, 2000).

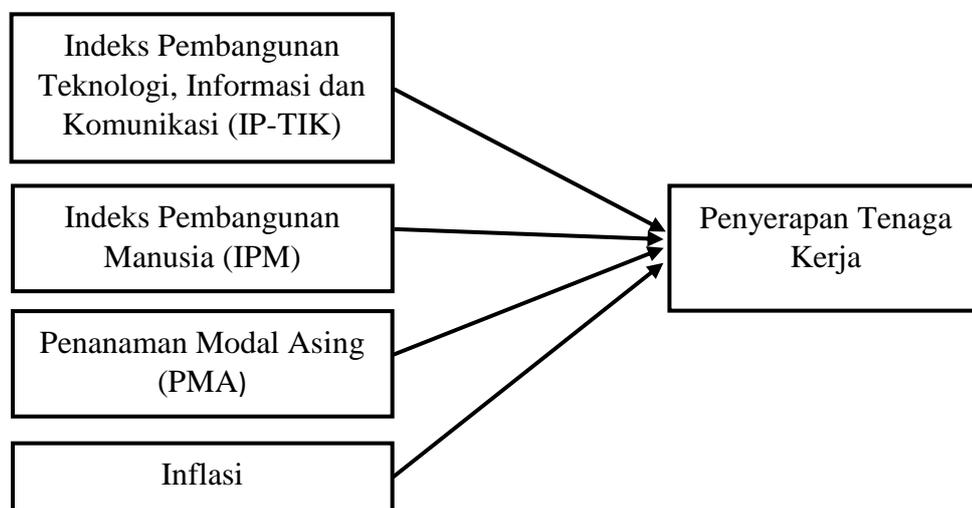
Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama dan Anis (2022), Alsavira (2021), Rizkiadi (2016), Yuda et al., (2022), dan Rachman et al., (2022) yang menyatakan bahwa variabel penanaman modal asing, berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya ketika PMA naik penyerapan tenaga kerja pun naik.

2.2.4 Hubungan Inflasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Inflasi dapat memengaruhi perekonomian sebuah negara dengan beberapa dampak dan akibat. Salah satunya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan pada output dan tenaga kerja dengan cara mendorong perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari sebelumnya, tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi (Nanga, 2005:248). Apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan, perusahaan akan meningkatkan output atau produksinya karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang masih dapat dijangkau oleh produsen. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat dikarenakan perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk meningkatkan output yang selanjutnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi tergolong berat (*hyperinflation*) maka perusahaan akan mengurangi jumlah *ouput* akibatnya tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja semakin berkurang dan pengangguran bertambah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiawan (2024), Nur (2023), dan Abdillah (2019) yang menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan menurut penelitian lain yaitu Anjani et al., (2021), dan Utama et al., (2021) yang menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan arti apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi maka akan berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja, dan sebaliknya apabila terjadi penurunan tingkat inflasi maka akan berpotensi meningkatnya tenaga kerja yang terserap.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, bahwa IP-TIK, IPM, PMA, dan inflasi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial IP-TIK, IPM, PMA, dan Inflasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006-2022.
2. Diduga secara bersama-sama IP-TIK, IPM, PMA, dan inflasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2006-2022.
3. Diduga elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap IP-TIK, IPM, PMA, dan inflasi bersifat inelastis.